

## ANALISIS SENTIMEN MEDIA SOSIAL: HATE SPEECH KEPADA PEMERINTAH DI TWITTER

<sup>1)</sup>Anwar Sadat, <sup>2)</sup>Herman Lawelai, <sup>3)</sup>Ansar Suherman

<sup>1,2</sup>Department of Government Science, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

<sup>3</sup>Department of Communication Science, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia  
[nanwarsadat685@gmail.com](mailto:nanwarsadat685@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentimen publik terhadap ujaran kebencian terhadap pemerintah di media sosial Twitter. Studi ini menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di Drone Emprit Academic. Studi ini menganalisis total 1.088 tweet yang terkumpul di Twitter dengan tweet "Hate Speech Terhadap Pemerintah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap hate speech terhadap pemerintah selama 1 September hingga 31 Desember 2021 adalah positif dengan angka 67% merespon positif, 31% merespons negatif, dan sisanya 1% merespon netral. Dengan demikian kebijakan pemerintah diperlukan untuk melindungi kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang sangat mendasar sekaligus membatasi penyebaran ujaran kebencian. Peran penegak hukum dalam memerangi ujaran kebencian sangat penting, tetapi itu bukan satu-satunya pilihan. Pendidikan multikultural dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk membina masyarakat demokratis yang matang dengan standar etika yang tinggi.

**Kata Kunci:** Ujaran Kebencian, Kebijakan Pemerintah, DEA, Media Sosial, Twitter

### Abstract

*This study aims to determine public sentiment towards hate speech against the government on Twitter social media. This study analyzes and uses data available on Drone Emprit Academic. This study analyzed a total of 1,088 tweets collected on Twitter with the tweet "Hate Speech Kepada Pemerintah". The results of this study indicate that the public's response to hate speech against the government during September 1 to December 31, 2021 is positive with 67% responding positively, 31% responding negatively, and the remaining 1% responding neutrally. Thus, government policies are needed to protect freedom of expression as a very basic human right while at the same time limiting the spread of hate speech. The role of law enforcement in fighting hate speech is critical, but it is not the only option.*

**Keywords:** Hate Speech, Government Policy, DEA, Social Media, Twitter

## A. PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial dan situs berita online yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan banyaknya informasi baru di media sosial. Setiap orang diizinkan untuk mengekspos apa pun melalui profil media sosial mereka. Bahkan berita di situs berita yang siap dibagikan di media sosial dapat dikomentari oleh netizen lain. Pada kenyataannya, bahkan dalam berita online, area komentar dibuat untuk pembaca. Kabar tersebut kemudian ditanggapi secara berbeda oleh netizen secara positif, negatif, dan netral (Wiana, 2019). Jaringan sosial Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi (Al Serhan & Elareshi, 2019).

Peningkatan dalam keterlibatan sosial di media sosial hampir berbanding lurus dengan peningkatan pesan jahat yang memanfaatkan infrastruktur tersebut. Bahasa kasar digunakan dalam komunikasi kebencian untuk menyerang individu (selebriti, produk, atau politisi, misalnya) atau kelompok tertentu (agama, gender, dan organisasi). Mendeteksi bahasa jahat dan kasar seperti itu sangat penting untuk menganalisisnya dalam kaitannya dengan sekelompok orang atau perusahaan tertentu (Guellil et al., 2020).

Media, khususnya jejaring sosial sebagai metode komunikasi massa, memainkan peran penting dalam menumbuhkan keragaman, rasa hormat, toleransi, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Bagaimanapun, mereka sering menjadi pendukung ujaran kebencian. Ujaran kebencian akhir-akhir ini menemukan cara baru untuk menampilkan dirinya, selain media konvensional, melalui media sosial, Internet, yang popularitas dan penggunaannya secara luas memungkinkan konten tertentu menjangkau khalayak seluas-luasnya. Dengan demikian terlihat adanya penyalahgunaan media dan jejaring sosial untuk mengabaikan keragaman, mempromosikan prasangka, dan intoleransi (Majhosev et al., 2020).

Era baru teknologi informasi menghadirkan manfaat baru tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Peningkatan normativitas yang dirasakan dari ujaran kebencian seperti anti-Muslim dapat beroperasi sebagai salah satu mekanisme di mana penggunaan media sosial dikaitkan

dengan peningkatan prasangka Islam (Soral et al., 2020).

Persepsi publik terhadap sebuah pesan atau isi sebuah berita sangat dipengaruhi oleh media sosial, baik yang kuat maupun yang lemah. Persepsi permusuhan di media sosial berbeda secara signifikan dengan psikologi, di mana yang terakhir menegaskan bahwa seseorang menafsirkan informasi atau berita untuk mendukung perspektifnya sendiri daripada pendapat orang lain. Di Indonesia, fenomena permusuhan yang ditimbulkan oleh pernyataan kebencian di media bukanlah hal baru.

Persepsi publik terhadap sebuah pesan atau isi sebuah berita sangat dipengaruhi oleh media sosial, baik yang kuat maupun yang lemah. Persepsi permusuhan di media sosial berbeda secara signifikan dengan psikologi, di mana yang terakhir menegaskan bahwa seseorang menafsirkan informasi atau berita untuk mendukung perspektifnya sendiri daripada pendapat orang lain. Di Indonesia, fenomena permusuhan yang ditimbulkan oleh pernyataan kebencian di media bukanlah hal baru (Ichwani et al., 2019).

Dengan menggunakan koneksi internet, pengguna dapat dengan bebas membuat, menghapus, dan membagikan ide-ide mereka di media sosial. Beberapa perubahan fitur baru-baru ini terjadi. Saat ini, platform media sosial memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri secara bebas melalui bahasa alami (Defersha & Tune, 2021).

Peningkatan luar biasa dalam keterlibatan sosial di media sosial hampir berbanding lurus dengan peningkatan pesan jahat yang memanfaatkan infrastruktur internet. Bahasa kasar digunakan dalam komunikasi kebencian untuk menyerang individu (selebriti, produk, atau politisi, misalnya) atau kelompok tertentu (agama, gender, dan organisasi). Mendeteksi bahasa jahat dan kasar seperti itu sangat penting untuk menganalisisnya dalam kaitannya dengan sekelompok orang atau perusahaan tertentu (Guellil et al., 2020).

Terlepas dari kenyataan bahwa media sosial telah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik Ethiopia saat ini, ujaran kebencian di media sosial telah menjadi umum. Berbagai kebijakan tidak efektif dalam mengakhiri ujaran kebencian, tetapi dimungkinkan untuk melakukannya dengan menghadirkan pemerintahan yang

sah, tata pemerintahan yang baik, kesetaraan, dan berkeadilan (Belay, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi fenomena global yang dikenal sebagai troll online, flaming, atau trolling di media sosial. Troll adalah seseorang yang memposting pernyataan yang menghasut dan di luar topik di internet, baik di media sosial atau di forum diskusi online, dengan tujuan menghasut tanggapan emosional pengguna lain atau mengganggu proses debat. Troll online selalu menggunakan identitas palsu, foto profil, dan deskripsi profil. Studi ini menyelidiki dan mengeksplorasi subjek troll online dan penyebaran ujaran kebencian di platform media sosial. Istilah "troll internet" secara eksklusif digunakan oleh orang-orang yang memposting komentar dalam diskusi newsgroup di luar topik. Namun, kata troll kini sering digunakan untuk menyebut siapa saja yang menggunakan kata-kata makian, cabul, atau ujaran kebencian di berbagai situs media sosial. Troll online dinyatakan memiliki gangguan kepribadian psikologis karena mereka berbicara kasar dengan mudah untuk merusak kredibilitas seseorang di media sosial (M.Si & M.Si, 2020).

Ujaran kebencian dan bahasa kotor di platform media sosial seperti yang terjadi di Nigeria, serta implikasi moral dan hukum bagi masyarakat (Alakali et al., 2016).

Ujaran kebencian dan praktik diskriminatif dibentuk tidak hanya oleh jaringan ikatan antara kebijakan platform, keterjangkauan teknologi, dan tindakan komunikatif penggunaannya, tetapi juga oleh jaringan ikatan antara kebijakan platform, keterjangkauan teknologi, dan tindakan komunikatif penggunaannya (Ben-David & Matamoros-Fernández, 2016). Ujaran kebencian marak di media sosial. Meskipun sebagian besar perusahaan media sosial besar, seperti Google, Facebook, dan Twitter, memiliki kebijakan yang mengatur apakah dan jenis ujaran kebencian apa yang diizinkan di platform mereka, pembatasan terkadang diterapkan secara tidak konsisten dan sulit dipahami oleh pengguna (Ring, 2013).

Ujaran kebencian berbasis kasta banyak digunakan di media sosial, termasuk sindiran yang menyinggung panggilan berbasis kasta seperti pemulungan manual. Apakah ujaran kebencian berbasis kasta harus dilarang hanya ketika ada dorongan untuk melakukan kekerasan atau kebencian,

atau jika itu juga harus dilarang ketika melanggar hak martabat Dalit (Sajlan, 2021).

Penciptaan, penyebaran, dan regulasi ujaran kebencian telah diubah oleh masyarakat global dan teknologi baru, terutama yang disuarakan secara online. Di satu sisi, standar periklanan perusahaan media sosial global mencakup rekomendasi untuk menghapus ujaran kebencian atau pernyataan serupa. Dari perspektif lain, undang-undang hak asasi manusia internasional prihatin tentang bagaimana peraturan perusahaan media sosial ini diatur dan diimplementasikan sehubungan dengan hak atas kebebasan berekspresi (Marques da Silva, 2020).

Anotasi membantu pemeriksaan korpus dan bagaimana jenis emotikon tertentu (misalnya 'mengedipkan mata' dan 'skeptis') dapat membantu mengungkap kasus ujaran kebencian tidak langsung yang tidak dapat diakses (Bick, 2020).

Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial harus dimulai dari tahap pertama, yakni kepolisian. Pelaku ujaran kebencian kemudian dirujuk ke kejaksaan, yang merupakan tahap akhir persidangan. Sanksi bagi pelanggar ujaran kebencian berupa pidana penjara dan denda diharapkan dapat membuat jera para pelaku ujaran kebencian di media sosial. Faktor Kesadaran Masyarakat, Faktor Keamanan, dan Faktor Penegakan Hukum semuanya merupakan faktor penghambat. Upaya mengatasi kendala tersebut, seperti, pembentukan divisi khusus oleh kepolisian yang khusus menangani kasus cybercrime, diadakannya cyberpatrol untuk memantau sosial. aktivitas media, dan pembentukan badan siber. upaya nasional untuk mengurangi penyebaran konten negatif di media sosial, serta tersedianya layanan pemerintah untuk memudahkan masyarakat melaporkan kasus kejahatan dunia maya (Situngkir et al., 2020).

Mengamati fenomena tersebut maka penelitian ini menganalisis sentiment public di media sosial Twitter perlu dilakukan. Fenomena ujaran kebencian memang menarik untuk digambarkan. Hal ini sebagai respon atas sejumlah kejadian yang belakangan ini memicu ketegangan di masyarakat. Ujaran kebencian adalah ungkapan yang memotivasi orang-orang dari kelompok sosial tertentu yang dibedakan oleh perbedaan seperti ras, asal negara, agama,

dan jenis kelamin (Subyantoro & Apriyanto, 2020).

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan data sekunder dalam hubungannya dengan pendekatan media sosial, khususnya Twitter. Analisis Sentimen, seperti yang disajikan dalam Drone Emprit, digunakan oleh penulis. Website Universitas Islam Indonesia menampilkan data dan analisis media sosial tentang beberapa isu sosial yang menarik dengan menggunakan Artificial Intelligence (AI). Alat berbasis AI memainkan peran yang semakin penting di media: dari alat pintar yang membantu peneliti menganalisis data secara otomatis melalui alat yang mereka gunakan (Helberger et al., 2020).

Penulis juga menelusuri artikel-artikel bereputasi baik melalui Publish or Perish untuk referensi artikel dengan kata kunci demokrasi dan kebebasan berpendapat dari berbagai perspektif. Selanjutnya penulis menganalisis masalah dengan mengutip beberapa artikel jurnal dari jurnal bereputasi yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini memanfaatkan data Twitter yang di-crawl oleh aplikasi Ismail Fahmi (Fahmi, 2018), Drone Emprit Academic (DEA). "Hate Speech Terhadap Pemerintah" adalah kata kunci yang digunakan untuk penyajian data. DEA mengumpulkan percakapan dari 1 September 2021 hingga 31 Desember 2021. DEA memperoleh data melalui Antarmuka Program Aplikasi Twitter. Untuk mengambil data ini melalui panggilan API, gunakan metode: {"id":1214,"name":"Hate Speech Terhadap Pemerintah","start\_date":"2021-9-1","end\_date":"2021-12-31","data":{"neg":342,"pos":734,"net":12}}

Penelitian ini mengkaji semua tweet yang diproses, opini publik tentang "Hate Speech Terhadap Pemerintah" diselidiki (termasuk mention, retweet, dan balasan). Mesin DEA menentukan apakah emosi utama itu positif, negatif, atau netral dengan menganalisis frekuensi kata dan suasana hati Twitter. Algoritma penginderaan DEA dibuat menggunakan metode pembelajaran mesin, dan hasilnya diinterpretasikan menggunakan pengklasifikasi probabilitas (Fahmi, 2017). Saat ini, penyedia layanan Telekomunikasi menghasilkan banyak catatan data. Pemahaman yang jelas tentang pelanggan mereka adalah kunci keberhasilan institusi

mana pun. Untuk menganalisis perilaku dan hubungan antar pelanggan, analisis jaringan biasanya digunakan untuk mendeteksi influencer dan komunitas yang dibagikan di media sosial (Werayawarungura et al., 2016). Analisis jaringan bukanlah teori formal dalam sosiologi melainkan strategi untuk menyelidiki struktur sosial (Otte & Rousseau, 2002).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial diakui sebagai platform pendeteksi yang digunakan untuk menilai perilaku pengguna di dunia nyata. Namun, umpan pesan yang besar dan tanpa filter yang disiarkan di media sosial memicu peringatan sosial, terutama ketika komunikasi ini berisi ujaran kebencian yang menargetkan orang atau komunitas tertentu. Pengaruh berbahaya dari pesan-pesan ini pada individu atau masyarakat pada umumnya menjadi perhatian utama pemerintah dan kelompok non-pemerintah (Ibrahim et al., 2021).

Ujaran kebencian yang disebarluaskan secara online menjadi masalah utama, terutama dengan kemajuan teknologi. Facebook, Twitter, dan platform media sosial lainnya telah digunakan secara luas sebagai sarana untuk mengirimkan pesan yang tidak menyenangkan, kasar, dan jahat. Ada kasus di mana konten tersebut telah menyebabkan kegemparan publik dan bahkan hukuman pidana. Begitupun keinginan mengapus batasan sewenang-wenang yang menghambat hak asasi manusia untuk kebebasan berekspresi dan memberikan rekomendasi tentang apa yang perlu diperhatikan jika dan kapan ujaran kebencian secara tegas diatur (Wan et al., 2017).

Selama periode penelitian ini, 1.088 sebutan dikumpulkan di Twitter. Gambar 1 menunjukkan bahwa mentions paling banyak dilakukan pada tanggal 15 September 2021 sebanyak 64 mentions dan puncaknya pada tanggal 14 Oktober 2021 sebanyak 70 mentions.

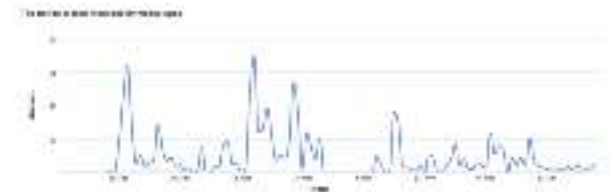


Figure 1. Mentions by date

Pada Gambar 1, tren kicauan warga dunia maya terlihat merespons isu Hate Speech Terhadap Pemerintah di media Twitter. Kicauan warganet paling banyak

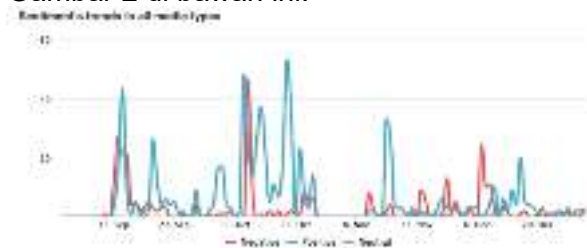


dilakukan terkait penanganan pemerintah dalam mengatasi penyebaran Coronavirus disease (COVID-19) di Indonesia. Wabah COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia, telah mengubah pergerakan masyarakat dalam berbagai hal. Selain itu, epidemi telah mengubah cara individu mengonsumsi berita dan informasi.

Selain itu, pola arus komunikasi dan informasi dalam masyarakat berkembang. Telah terjadi pergeseran konsumsi publik terhadap berita dan media.

Menurut survei, media online dan media sosial adalah sumber berita dan informasi paling populer di populasi metropolitan, sementara televisi dan radio tetap menjadi pilihan utama bagi individu yang tidak memiliki akses internet. Menurut penelitian, sebagian besar orang yang menerima berita dan informasi dengan berani menggunakan ponsel.

Adapun analisis tren sentimen Hate Speech Terhadap Pemerintah di media Twitter selama jangka waktu penelitian ini dilakukan terlihat tren keseimbangan antara positif dan negatif, seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini:



**Figure 2. Sentiment Trend**

Platform media sosial memainkan peran penting dalam penyebaran ujaran kebencian melalui pengguna media sosial. Akibatnya, disarankan agar pengguna media sosial mempertimbangkan konsekuensi dari berpartisipasi dalam pemeliharaan ujaran kebencian dan konsekuensi dari melakukannya (Suleiman et al., 2021).

Hate Speech adalah fenomena multifaset dengan beberapa kehalusan, tingkat keragaman individu dan budaya yang tinggi, dan tumpang tindih dengan ide-ide terkait seperti bahasa ofensif, ancaman, intimidasi, dan sebagainya (Capozzi et al., 2020). The labeling findings are shown in Figures 3 and Figures 4 below:



**Figure 3. Example of positive mention**

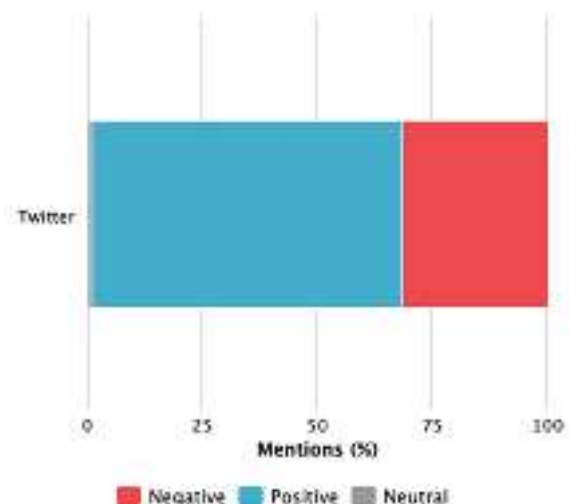
Figure 3 above describes positive tweets about democracy and freedom of speech, as seen on October 13 and October 23, 2021. Social media platforms used interactively are displayed and illustrate that users communicate interactively in two directions after one year of positive momentum (Chahine & Malhotra, 2018). While the tweet is negative, it can be seen in Figure 4 below:



**Figure 4. Example of negative mention**

Gambar 2 dan Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa tweet paling negatif dibuat oleh netizen pada tanggal 14 September Mei dan 14 Oktober 2021. Akibatnya, perasaan tidak menyenangkan itu lebih-lebihkan, dan sentimen negatif yang sebenarnya lebih dari yang terekam. Gambar 5 menunjukkan bahwa mood publik terhadap Hate Speech Terhadap Pemerintah di media Twitter 67% merespon positif, 31% merespons negatif, dan sisanya 1% merespon netral dari 1 September hingga 31 Desember 2021, sebagai berikut:

**Sentiments by Media Types**



### Figure 5. Public Sentiment Percentage

Gambar 5 menunjukkan sentimen positif mendominasi sentimen negatif terhadap Hate Speech Terhadap Pemerintah di media Twitter. Dunia online dan praktik media sosial yang berantakan dan kompleks diartikulasikan sebagai ujaran kebencian yang bertentangan dengan cara lain untuk membayangkan masalah yang berkembang ini di lingkungan media digital global (Pohjonen, 2019).

Hate Speech dapat menimbulkan penderitaan besar pada setiap korban yang menjadi sasaran, menimbulkan rasa takut dan isolasi dalam kelompok mereka, meracuni wacana publik dan mendorong berbagai jenis aktivitas ekstrem dan kekerasan (Vidgen & Yasseri, 2020). Peristiwa baru-baru ini telah membuktikan bahwa penggunaan komentar kejam dan kasar mendominasi percakapan platform media sosial (Auwal, 2018).

Pertumbuhan pesat ujaran kebencian rasial di Internet tampaknya telah melampaui kemampuan negara, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk membatasi penyebaran dan dampaknya. Namun, dengan memahami bagaimana ekonomi politik Internet memfasilitasi rasisme, adalah mungkin untuk merancang strategi untuk melawan efek sosial negatifnya. Hanya dengan melibatkan negara, ekonomi, dan masyarakat sipil dalam skala global dan lokal, proses semacam itu dapat mulai mengembangkan dinamika 'peradaban' yang efektif (Jakubowicz, 2017).

### D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 1.388.221 tweet dikumpulkan di Twitter dengan tweet "Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap Hate Speech Terhadap Pemerintah di media Twitter 67% merespon positif, 31% merespons negatif, dan sisanya 1% merespon netral dari 1 September hingga 31 Desember 2021. Dengan demikian media sosial memfasilitasi penciptaan ruang di mana orang dapat memahami, berbagi, dan secara interaktif menegosiasikan makna protes melalui dialog tentang demokrasi, meskipun data dan informasi yang disebarkan melalui media sosial seperti Twitter dapat dianggap tidak dapat diandalkan karena siapa pun yang

memiliki akun dapat menyebarluaskan informasi.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah diperlukan dalam rangka merawat kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sekaligus mencegah menyebarkan ujaran kebencian. Pentingnya penegakan hukum dalam memerangi ujaran kebencian, namun hukum bukanlah satu-satunya jalan. Pendidikan multikultural dipandang sebagai pendekatan jangka panjang untuk mengembangkan masyarakat demokratis yang matang dengan standar etika yang kuat.

### E. REFERENSI

- Belay, D. G. (2020). Failure of Governance, State Legitimacy, and Hate Speech in Ethiopia. *International Journal of Political Activism and Engagement*, 7(1), 64–76.  
<https://doi.org/10.4018/ijpae.2020010104>
- Ben-David, A., & Matamoros-Fernández, A. (2016). Hate speech and covert discrimination on social media: Monitoring the Facebook pages of extreme-right political parties in Spain. *International Journal of Communication*, 10, 1167–1193.  
<https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3697>
- Bick, E. (2020). Annotating Emoticons and Emojis in a German-Danish Social Media Corpus for Hate Speech Research. In *RASK—International journal of language and ...* sdu.dk.  
[https://www.sdu.dk/-/media/files/om\\_sdu/institutter/isk/forskningspublikationer/rask/rask+52/bick\\_ar\\_tikel.pdf](https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/isk/forskningspublikationer/rask/rask+52/bick_ar_tikel.pdf)
- Capozzi, A. T. E., Lai, M., Basile, V., Poletto, F., Sanguinetti, M., Bosco, C., Patti, V., Ruffo, G., Musto, C., Polignano, M., Semeraro, G., & Stranisci, M. (2020). "Contro L'Odio": A Platform for Detecting, Monitoring and Visualizing Hate Speech against Immigrants in Italian Social Media. In *Italian Journal of Computational Linguistics* (Vol. 6, Issue 1, pp. 77–97). [journals.openedition.org. https://doi.org/10.4000/ijcol.659](https://doi.org/10.4000/ijcol.659)
- Chahine, S., & Malhotra, N. K. (2018). Impact of social media strategies on stock price: the case of Twitter. *European Journal of Marketing*, 52(7–8), 1526–1549.  
<https://doi.org/10.1108/EJM-10-2017->

0718

- Defersha, N. B., & Tune, K. K. (2021). Detection of Hate Speech Text in Afan Oromo Social Media using Machine Learning Approach. In *Indian Journal of Science and Technology* (Vol. 14, Issue 31, pp. 2567–2578). sciresol.s3.us-east-2.amazonaws.com  
<https://doi.org/10.17485/ijst/v14i31.1019>
- Fahmi, I. (2017). Drone Emprit: Konsep dan Teknologi. *IT Camp on Big Data and Data Mining, Jakarta*.  
<https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3/drone-emprit-konsep-dan-teknologi>
- Fahmi, I. (2018). Drone Emprit Academic: Software for social media monitoring and analytics. In *Drone Emprit Academic*. academic.droneemprit.id
- Guellil, I., Adeel, A., Azouaou, F., Chennoufi, S., Maafi, H., & Hamitouche, T. (2020). Detecting hate speech against politicians in Arabic community on social media. *International Journal of Web Information Systems*, 16(3), 295–313.  
<https://doi.org/10.1108/IJWIS-08-2019-0036>
- Helberger, N., Van Drunen, M., Eskens, S., Bastian, M., & Moeller, J. (2020). A freedom of expression perspective on AI in the media-with a special focus on editorial decision making on social media platforms and in the news media. *European Journal of Law and Technology*, 11(3).  
[https://lawreview.law.ucdavis.edu/issue/s/51/3/Essays/51-3\\_Balkin.pdf](https://lawreview.law.ucdavis.edu/issue/s/51/3/Essays/51-3_Balkin.pdf)
- Ibrahim, V., Bakar, J. A., Harun, N. H., & Abdulateef, A. F. (2021). A word cloud model based on hate speech in an online social media environment. *Baghdad Science Journal*, 18, 937–946.  
[https://doi.org/10.21123/bsj.2021.18.2\(Suppl.\).0937](https://doi.org/10.21123/bsj.2021.18.2(Suppl.).0937)
- Ichwani, T., Damayanti, A., & Rianto. (2019). Hate Speech And Hoax Phenomenons In Indonesia's Social Media: Utilization In Getting Company Profits. *Asian Journal of Behavioural Sciences*, 1(2), 17–27.  
<http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajbs/article/view/7575>
- Jakubowicz, A. (2017). Alt\_Right white lite: Trolling, hate speech and cyber racism on social media. *Cosmopolitan Civil Societies*, 9(3), 41–60.  
<https://doi.org/10.5130/ccs.v9i3.5655>
- M.Si, I. G., & M.Si, S. (2020). The Phenomenon of Internet Trolling and the Spreading of Hate Speech on Social Media. In *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* (Vol. 24, Issue 1, pp. 510–517).  
<https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i1/pr200156>
- Majhosev, A., Denkova, J., & Osmanov, S. (2020). Hate speech on social networks and traditional media in Republic of N. Macedonia. *Journal of Process Management. New Technologies*, 8(3), 82–90.  
<https://doi.org/10.5937/jouproman8-27435>
- Marques da Silva, B. (2020). Discurso de ódio nas normativas transnacionais de empresas de mídias sociais: Uma abordagem acerca das possibilidades da autorregulação regulada: Hate speech in the transnational norms of social media companies: An approach on the possibilities of regulat. *Brazilian Journal of International Relations*, 9(2), 405–433.  
<https://doi.org/10.36311/2237-7743.2020.v9n2.p405-433>
- Otte, E., & Rousseau, R. (2002). Social network analysis: A powerful strategy, also for the information sciences. *Journal of Information Science*, 28(6), 441–453.  
<https://doi.org/10.1177/016555150202800601>
- Pohjonen, M. (2019). Extreme Speech| A Comparative Approach to Social Media Extreme Speech: Online Hate Speech as Media Commentary. *International Journal of Communication*, 13, 3088–3103. <https://eprints.soas.ac.uk/31348>
- Ring, C. (2013). Hate Speech IN Social Media: An Exploration of The Problem And Its Proposed Solutions. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.  
<https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/20>
- Sajlan, D. (2021). Hate Speech against Dalits on Social Media: Would a Penny Sparrow be Prosecuted in India for Online Hate Speech? *CASTE / A Global Journal on Social Exclusion*, 2(1), 77–96.  
<https://doi.org/10.26812/caste.v2i1.260>

- Situngkir, F. V., Rodhiyah, S., & Istinah, D. (2020). The Enforcement of Criminal Laws of Hate Speech in Social Media. *Law Development Journal*, 2(4), 542–548. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/13642>
- Soral, W., Liu, J. H., & Bilewicz, M. (2020). Media of contempt: Social media consumption predicts normative acceptance of anti-muslim hate speech and islamoprejudice. *International Journal of Conflict and Violence*, 14, 1–13. <https://doi.org/10.4119/ijcv-3774>
- Subyantoro, S., & Apriyanto, S. (2020). Impoliteness in Indonesian Language Hate Speech on Social Media Contained in the Instagram Account. In *Journal of Advances in Linguistics* (Vol. 11, pp. 36–46). core.ac.uk. <https://doi.org/10.24297/jal.v11i.8655>
- Suleiman, G., Santas, T., & ... (2021). Perception of Hate Speech on Social Media among Residents of Keffi and Lafia Local Government Areas of Nasarawa State. *SAU JOURNAL OF ...* <https://journals.sau.edu.ng/index.php/sjmas/article/view/406>
- Vidgen, B., & Yasseri, T. (2020). Detecting weak and strong Islamophobic hate speech on social media. *Journal of Information Technology and Politics*, 17(1), 66–78. <https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1702607>
- Wan, M., Nor, M., & Razak, S. A. (2017). Regulating Hate Speech on Social Media: Should We or Shouldn'T We? In *Malayan Law Journal* (Vol. 4, Issue August, pp. 0–11). researchgate.net. [https://www.researchgate.net/profile/Murni-Wan-Mohd-Nor/publication/321529397\\_REGULATING\\_HATE\\_SPEECH\\_ON\\_SOCIAL\\_MEDIA\\_SHOULD\\_WE\\_OR\\_SHOULDN'T\\_WE/links/5a267ec90f7e9b71dd0a1e73/REGULATING-HATE-SPEECH-ON-SOCIAL-MEDIA-SHOULD-WE-OR-SHOULDNT-WE.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Murni-Wan-Mohd-Nor/publication/321529397_REGULATING_HATE_SPEECH_ON_SOCIAL_MEDIA_SHOULD_WE_OR_SHOULDN'T_WE/links/5a267ec90f7e9b71dd0a1e73/REGULATING-HATE-SPEECH-ON-SOCIAL-MEDIA-SHOULD-WE-OR-SHOULDNT-WE.pdf)
- Werayawarangura, N., Pungchaichan, T., & Vateekul, P. (2016). Social network analysis of calling data records for identifying influencers and communities. *2016 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2016*. <https://doi.org/10.1109/JCSSE.2016.7748864>
- Wiana, D. (2019). Analysis of the use of the hate speech on social media in the case of presidential election in 2019. *Journal of Applied Studies in Language*, 3(2), 158–167. <https://doi.org/10.31940/jasl.v3i2.1541>